

ANALISIS RASIO KEMANDIRIAN, RASIO EFEKTIVITAS PAD, DAN RASIO EFISIENSI PAD PADA LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN SUKABUMI

AN ANALYSIS OF INDEPENDENCY RATIO, LOCAL REVENUE EFFECTIVENESS RATIO, AND LOCAL REVENUE EFFICIENCY RATIO OF THE BUDGET REALIZATION REPORT IN SUKABUMI REGENCY

D. Kartika, IC. Kusuma.

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Djuanda Bogor
Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35, Kode Pos 16720, Telp/Fax: (0251) 8245155
E-mail : deuis.kartika@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to determine financial performance in autonomous Regency of Sukabumi by analyzing of independency ratio, effectiveness ratio, and local revenue efficiency ratio of PAD on APBD realization report of Sukabumi Regency. The data used is the budget realization report for fiscal year of 2009-2013. The data analysis using descriptive statistical methods. The results showed that financial independency of Sukabumi Regency for fiscal year of 2009-2013 amounted to an average of only 8.15% were classified as very low by showing the pattern of relationships instructive. Local revenue effectiveness ratio of Sukabumi Regency for fiscal year of 2009-2013 average achievement level of 105.67% of the budget set which is classified as very effective. Sukabumi financial performance of 2009-2013 fiscal year by Local Revenue efficiency ratio as very efficient with an average of 5.02% annually.

Keywords: Independency ratio, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Realization Report, Regional Budget

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Kabupaten Sukabumi dengan menganalisis rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Realisasi APBD Kabupaten Sukabumi. Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2009-2013. Analisis data menggunakan metode statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian Kabupaten Sukabumi dari tahun anggaran 2009-2013 rata-rata hanya sebesar 8,15% yang tergolong sangat rendah dengan menunjukkan pola hubungan instruktif. Rasio efektivitas PAD Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2009-2013 rata-rata tingkat pencapaiannya sebesar 105,67% dari anggaran yang ditetapkan yang tergolong sangat efektif. Kinerja keuangan Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2009-2013 berdasarkan rasio efisiensi PAD tergolong sangat efisien dengan rata-rata setiap tahunnya sebesar 5,02%.

Kata Kunci: Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Laporan Realisasi, APBD.

PENDAHULUAN

Undang-undang No. 20 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang menjadi tonggak dimulainya Otonomi Daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No.32 Tahun 2004). Pemberian Otonomi Daerah kepada Kabupaten dan Kota tersebut menjadikan pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan Pemerintah Daerah (Indra dan Gatot, 2002:1). Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah (Ardhini dan Sri, 2010:2).

Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam menjalankan otonomi dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (PP No.105 Tahun 2000) serta diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah (UU No. 32 Tahun 2004). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah (PP No.58 tahun 2005) serta merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (UU No.32 tahun 2004). Sehingga, APBD secara langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelaksanaan sosial (Halim, 2002:126).

Peraturan Pemerintah No.105 tahun 2000 mensyaratkan pertanggungjawaban keuangan dalam bentuk laporan keuangan bagi Kepala Daerah. Dalam Nordiawan dkk (2008:305), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Laporan Keuangan konsolidasi

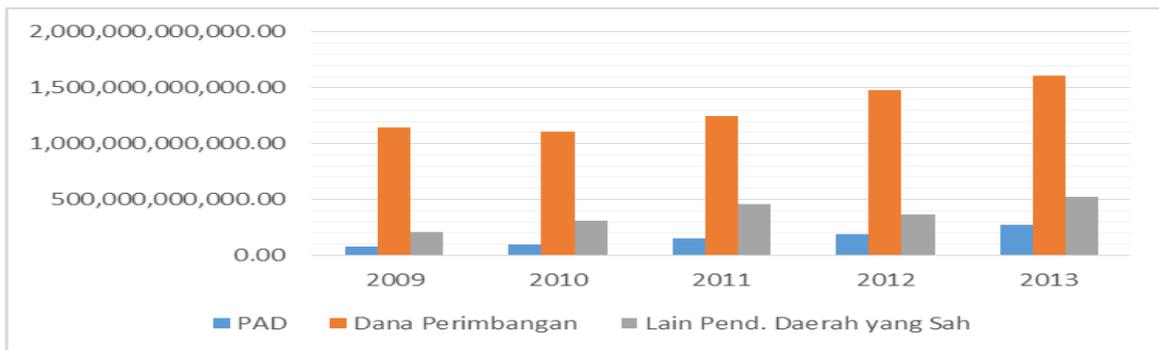
dari Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Laporan Keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan ditunjukkan dengan kinerja keuangan yang baik pula (Sularso dan Restianto, 2011:114). Adapun, salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2002:126). Analisis rasio keuangan merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang dituangkan dalam APBD (Halim, 2002:136).

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Oleh karena itu perhatian terhadap manajemen pendapatan dan analisis pendapatan daerah menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah (Mahmudi, 2010:136).

Kabupaten Sukabumi adalah bagian dari Provinsi Jawa Barat yang merupakan kabupaten terluas di Jawa Barat dan kabupaten terluas kedua di Pulau Jawa setelah Kabupaten Banyuwangi (id.wikipedia.org). Kondisi wilayah Kabupaten Sukabumi mempunyai potensi wilayah lahan kering yang luas (jabarprov.go.id). Selain itu, Kabupaten Sukabumi dinobatkan sebagai Kota Minapolitan pertama di Indonesia yang berbasis perikanan tangkap oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan keputusan No.kep.32/men/2010 tentang penetapan Kawasan Minapolitan (penataanruang.pu.go.id).

Adapun pendapatan Kabupaten Sukabumi berdasarkan sumber pendapatan selama tahun anggaran 2009-2013 disajikan pada Gb. 1 Pendapatan Kabupaten Sukabumi Tahun 2009-2013 di bawah ini.



Sumber: DPPKAD Kab. Sukabumi, 2015 (Data Diolah)

Gb.1 diatas menunjukkan bahwa Kontribusi Dana Perimbangan rata-rata sebesar 72 % dari seluruh pendapatan daerah, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 19,85 % dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 8,15 %. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah yang mencerminkan kemandirian daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Namun demikian, pada kenyataannya banyak daerah yang masih tergantung pada dana transfer dari pusat karena minimalnya PAD. Fenomena ini perlu dikaji, karena jika dilihat berdasarkan data yang ada, potensi ekonomi yang dimiliki daerah untuk mengembangkan PAD masih cukup besar, namun potensi-potensi tersebut belum dapat digali dengan baik (*djpk.depkeu.go.id*).

Hal tersebut menjadikan dimensi keuangan daerah otonom yang paling krusial untuk diteliti adalah kemandirian keuangan daerah otonom kabupaten/kota. Rasio kemandirian daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Dimensi lain yang tidak kalah pentingnya adalah dimensi efektivitas keuangan daerah otonom sebagai indikator keberhasilan daerah dalam merealisasikan PAD yang dianggarkan (Dwiranda, 2007:4). Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2002:129). Mengukur kinerja

pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD, indikator rasio efektivitas PAD saja belum cukup, sebab meskipun jika dilihat dari rasio efektivitasnya sudah baik tetapi bila ternyata biaya untuk mencapai target tersebut sangat besar, maka berarti pemungutan PAD tersebut tidak efisien. Oleh karena itu perlu pula dihitung rasio efisiensi PAD (Mahmudi, 2010:143). Menurut Mardiasmo (2010:133), efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sukabumi pada tahun anggaran 2009-2013?
2. Bagaimana efektivitas PAD Kabupaten Sukabumi pada tahun anggaran 2009-2013?
3. Bagaimana efisiensi PAD Kabupaten Sukabumi pada tahun anggaran 2009-2013?

METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kab. Sukabumi. Data-data LRA tersebut dapat dikumpulkan melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Sukabumi yang beralamat di Jalan Siliwangi No. 10 Pelabuhanratu 43164 - Kabupaten Sukabumi Jawa Barat.

Desain dalam penelitian ini adalah desain deskriptif. Tujuan dari desain ini hanya mengumpulkan fakta dan menguraikannya secara menyeluruh dan teliti sesuai dengan persoalan yang akan dipecahkan (Umar, 1997:63).

Data dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kuantitatif. Menurut Teguh (2005:118), data kuantitatif adalah data statistik yang berbentuk angka baik digali secara langsung dari hasil penelitian maupun Penelusuran Data *Online*

Metode Analisis Data

Analisis Rasio Kemandirian

Langkah-langkah menganalisis rasio kemandirian dilakukan dengan cara sebagai berikut

1. Mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mentabulasi data realisasi PAD dan total pendapatan dari LRA Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2009-2013.
2. Menghitung rasio kemandirian berdasarkan masing-masing tahun anggaran yang diformulasikan sebagai berikut (Halim, 2002:128):

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total pendapatan}}$$

3. Menentukan polahubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) berdasarkan rasio kemandirian dengan berpedoman pada tabel 1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah sebagai berikut:

Kemandirian (%)	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
0%-25%	Rendah	Instruktif
25%-50%	Rendah	Konstruktif
50%-75%	Sedang	Partisipatif
75%-100%	Tinggi	Delegatif

Sumber: Halim (2002:189)

4. Menganalisis rasio kemandirian yang telah dihitung.

Analisis Rasio Efektivitas PAD

Langkah-langkah menghitung rasio efektivitas dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mentabulasi data anggaran dan realisasi PAD dari LRA Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2010-2013.
2. Menghitung rasio efektivitas PAD berdasarkan masing-masing tahun anggaran. Rumus rasio efektifitas yaitu:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Relisasi penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD}}$$

hasil pengolahan. Data tersebut merupakan data *time series* dan data sekunder.

Metode-metode yang akan digunakan untuk mengumpulkan data-data yang akan diteliti tersebut, yaitu Metode pengamatan, Dokumentasi, Studi kepustakaan, dan

3. Menentukan nilai efektivitas PAD dengan mengacu pada tabel 2 berikut

Kemampuan Keuangan	Rasio Efektivitas (%)
Sangat efektif	> 100
Efektif	100
Cukup efektif	90 – 99
Kurang efektif	75 – 89
Tidak efektif	< 75

Sumber: Mahmudi (2010: 142)

4. Menganalisis rasio efektivitas PAD yang telah dihitung.

Analisis Rasio Efisiensi PAD

Langkah-langkah menganalisis rasio efisiensi dilakukan dengan cara sebagai berikut

1. Mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mentabulasi data total pemerolehan PAD dan total realisasi PAD dari LRA Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2010-2013.
2. Menghitung rasio efisiensi PAD berdasarkan masing-masing tahun anggaran. Menurut Mahmudi (2010:143), rasio efisiensi diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan Daerah}}$$

3. Menentukan nilai efisiensi PAD terhadap realisasi APBD dengan mengacu pada tabel berikut:

Tabel 3

Efisiensi Keuangan Daerah Otonom	
Kemampuan Keuangan	Rasio Efisien (%)
Sangat efisien	< 10
Efisien	10 – 20
Cukup efisien	21 – 30
Kurang efisien	31 – 40
Tidak efisien	> 40

Sumber: Mahmudi (2010: 142)

4. Menganalisis rasio efisiensi PAD yang telah dihitung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Sukabumi adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibukotanya adalah Palabuhanratu. Kabupaten Sukabumi

Rasio kemandirian daerah dihitung dengan membandingkan realisasi PAD dengan realisasi total pendapatan daerah.

merupakan Kabupaten terluas di Jawa Barat (*id.wikipedia.org*).

Kemandirian Kabupaten Sukabumi

PAD dan total pendapatan Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2009-2013 dapat dilihat dalam Tabel 4 sebagai berikut:

1. Data Penelitian

Tabel 4 PAD dan Total Pendapatan Kabupaten Sukabumi TA 2009-2013

Tahun	PAD	Total Pendapatan
2009	80,616,078,322.8	1,432,336,419,645.8
2010	98,442,632,628.0	1,519,735,050,963.0
2011	151,825,718,336.0	1,856,087,255,070.0
2012	185,190,545,988.0	2,033,421,618,055.0
2013	273,452,383,010.7	2,408,355,096,102.7

Sumber: DPPKAD Kab. Sukabumi, 2015 (Data Diolah)

2. Perhitungan Rasio Kemandirian Kab. Sukabumi.

Berdasarkan data-data diatas dapat diketahui nilai rasio kemandirian,

kemampuan keuangan, dan pola hubungan Kabupaten Sukabumi terhadap pemerintah pusat pada tabel 5 sebagai berikut

Tabel 5 Kemandirian Kabupaten Sukabumi TA 2009-2013

Tahun	Rasio Kemandirian	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
2009	5,63%	Rendah Sekali	Instruktif
2010	6,48%	Rendah Sekali	Instruktif
2011	8,18%	Rendah Sekali	Instruktif
2012	9,11%	Rendah Sekali	Instruktif
2013	11,35%	Rendah Sekali	Instruktif
Rasio Rata-rata		8,15%	

Sumber: Data diolah (2015)

Efektivitas PAD Kab. Sukabumi

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target

yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2002:129).

1. Data Penelitian

Target dan Realisasi PAD Kab. Sukabumi tahun anggaran 2009-2013 disajikan pada Tabel 6 berikut:

Tabel 6 Target dan Realisasi PAD Kab. Sukabumi TA 2009-2013

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD
2009	80,616,078,322.80	79,139,208,000
2010	98,442,632,628.00	95,684,769,000
2011	151,825,718,336.01	142,886,719,848
2012	185,190,545,988.00	169,264,439,635
2013	273,452,383,010.66	253,302,129,261

Sumber: DPPKAD Kab. Sukabumi, 2015 (Data Diolah)

2. Perhitungan Rasio Efektivitas Kabupaten Sukabumi

Berdasarkan data target dan realisasi PAD yang disajikan sebelumnya dapat diketahui nilai rasio efektivitas PAD dan

interpretasi nilai efektivitas PAD Kabupaten Sukabumi. Tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7 Efektivitas Keuangan Kab Sukabumi TA 2009-2013

Tahun	Rasio Efektivitas	Kemampuan Keuangan
2009	101,87%	Sangat Efektif
2010	102,88%	Sangat Efektif
2011	106,26%	Sangat Efektif
2012	109,41%	Sangat Efektif
2013	107,96%	Sangat Efektif
Rasio Rata-rata		105,67%

Sumber: Data diolah, 2015

Efisiensi PAD Kabupaten Sukabumi

Kinerja pemerintah daerah dapat dikatakan efisien apabila telah mencapai tujuan yang ditetapkan dengan biaya yang dikeluarkan seminimal mungkin.

1. Data Penelitian

Biaya pemerolehan PAD dan Realisasi PAD Kab. Sukabumi tahun anggaran 2009-2013 disajikan pada sebagai berikut :

Tabel 8 Biaya Pemerolehan dan Realisasi PAD Kab. Sukabumi TA 2009-2013

Tahun	Biaya Pemerolehan PAD	Realisasi PAD
2009	10,687,915,423.00	80,616,078,322.80
2010	3,946,906,878.00	98,442,632,628.00
2011	4,606,137,287.00	151,825,718,336.01
2012	5,247,288,005.00	185,190,545,988.00
2013	5,420,225,765.00	273,452,383,010.66

Sumber: Data diolah, 2015

2. Perhitungan Rasio Efisiensi PAD Kabupaten Sukabumi

Berdasarkan data biaya perolehan dan realisasi PAD yang disajikan sebelumnya

dapat diketahui nilai rasio efisiensi PAD dan interpretasi nilai efisiensi PAD Kabupaten Sukabumi. Tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 9 Efisiensi PAD Kab. Sukabumi TA 2009-2013

Tahun	Rasio Efisiensi	Kemampuan Keuangan
2009	13,26%	Efisien
2010	4,01%	Sangat Efisien
2011	3,03%	Sangat Efisien
2012	2,83%	Sangat Efisien
2013	1,98%	Sangat Efisien
Rasio Rata-rata		5,02%

Sumber: Data diolah, 2015

Pembahasan

Analisis Kemandirian Kabupaten Sukabumi

Tingkat kemandirian Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2009-2013 sebagai berikut :

- a. Pada tahun 2009, rasio kemandirian Kabupaten Sukabumi sebesar 5,63% yang menunjukkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan hanya sebesar 5,63% atau sebesar Rp 80.616.078.322,80. Pada tahun tersebut

tingkat kemandirian Kabupaten Sukabumi tergolong rendah sekali dengan menunjukkan pola hubungan instruktif terhadap pemerintah pusat. Kontribusi dana dari pemerintah pusat melalui Dana Perimbangan sangat mendominasi, yaitu sebesar 79,76% atau sebesar Rp 1.142.458.841.028 dari total pendapatan daerah.

- b. Pada tahun 2010, rasio kemandirian Kabupaten Sukabumi meningkat sebesar

0,85% dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 6,48%. Kenaikan tersebut disebabkan karena PAD meningkat menjadi sebesar Rp 98.442.632.628 dan Dana Perimbangan mengalami penurunan menjadi sebesar Rp 1.109.665.959.724. Namun demikian, Kemandirian Kabupaten Sukabumi masih tergolong rendah sekali dengan menunjukkan pola hubungan instruktif terhadap pemerintah pusat.

- c. Pada tahun 2011, rasio kemandirian Kabupaten Sukabumi kembali mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,70%, yaitu menjadi sebesar 8,18%. Peningkatan tersebut dikarenakan terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada pos PAD, yaitu menjadi sebesar Rp 151.825.718.336,01 atau meningkat sebesar 54,23% dari tahun sebelumnya. Pada tahun ini, Pemerintah Kabupaten Sukabumi memperoleh tiga tambahan pendapatan pada pos pajak. Jenis pajak tersebut adalah Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, dan Pajak Bea Perolehan Hal atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Ketiga jenis pajak tersebut dapat memberikan kontribusi sebesar 71,79% pada total pendapatan pajak daerah. Selain itu kenaikan PAD dipengaruhi juga oleh adanya kenaikan tarif pada Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang sebelumnya 3% menjadi 5%. Setelah adanya kenaikan, realisasi PPJ pada tahun 2011 naik sebesar Rp 38% dari tahun 2010. Namun, pada tahun ini tingkat kemandirian Kabupaten Sukabumi masih tergolong rendah sekali dan masih menunjukkan pola hubungan yang instruktif. Hal tersebut dikarenakan Dana Perimbangan masih mendominasi, yaitu sebesar 67,33% dari total pendapatan daerah.
- d. Pada tahun 2012, Rasio Kemandirian Kabupaten Sukabumi sebesar 9,11% atau meningkat sebesar 0,93% dari tahun sebelumnya. Pada tahun ini, Dana Perimbangan masih

mendominasi Pendapatan Daerah, yaitu sebesar 72,88% atau sebesar Rp 1.481.897.180.676. Sedangkan, kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah hanya sebesar 9,11%. Sehingga, pada tahun tersebut tingkat kemandirian Kabupaten Sukabumi masih tergolong rendah sekali dan masih menunjukkan pola hubungan yang instruktif.

- e. Pada tahun 2013, rasio Kemandirian Kabupaten Sukabumi meningkat cukup besar jika dibandingkan peningkatan pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu meningkat menjadi sebesar 11,35% atau meningkat sebesar 2,25% dari tahun 2012. Peningkatan tersebut dikarenakan PAD meningkat sebesar 47,66%, yaitu menjadi sebesar Rp 273.452.383.010,66. Hal tersebut disebabkan karena adanya pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari pemerintah pusat ke daerah. sehingga jenis pajak yang dipungut oleh Kabupaten Sukabumi menjadi sebelas jenis pajak. PBB-P2 memberikan kontribusi sebesar 22,02% terhadap pendapatan pajak daerah Kabupaten Sukabumi. Namun, pada tahun tersebut Dana Peimbangan masih mendominasi sebesar 67% terhadap total Pendapatan Daerah, karena itu tingkat kemandirian Kabupaten Sukabumi masih rendah sekali dengan menunjukkan pola hubungan yang instruktif terhadap pemerintah pusat.

Analisis Efektivitas Kabupaten Sukabumi

Tingkat efektivitas PAD Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2009-2013 diuraikan sebagai berikut

- a. Pada tahun 2009, rasio efektivitas Kabupaten Sukabumi sebesar 101,87%. Kinerja keuangan Kabupaten Sukabumi berdasarkan rasio efektivitas PAD tergolong sangat efektif karena berada dalam kisaran lebih dari 100%. Hal tersebut menggambarkan pencapaian PAD tahun 2009 melampaui target yang telah ditetapkan sebesar Rp 1.476.870.322,80. Realisasi PAD pada tahun 2009 sebesar Rp

- 80.616.078.322,80, sedangkan target yang ditetapkan sebesar Rp 79.139.208.000.
- b. Pada tahun 2010, rasio efektivitas Kabupaten Sukabumi meningkat sebesar 1,02% dari tahun 2009, yaitu menjadi sebesar 102,88%. Kinerja keuangan Kabupaten Sukabumi tahun 2010 berdasarkan rasio efektivitas PAD tergolong sangat efektif. Realisasi PAD Kabupaten Sukabumi berhasil melampaui target PAD yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah sebesar Rp 98.442.632.628 dari total anggaran PAD sebesar Rp 95,684,769,000. Realisasi PAD pada tahun tersebut meningkat sebesar 22,11% dari tahun 2009 dan anggaran yang ditetapkan juga meningkat sebesar 20,91% dari tahun 2009.
 - c. Pada tahun 2011, rasio efektivitas Kabupaten Sukabumi sebesar 106,26% atau meningkat sebesar 3,37% dari tahun 2010. Kabupaten Sukabumi berhasil merealisasikan PAD lebih besar Rp8.938.998.488,01 melampaui target yang ditetapkan. Kinerja keuangan Kabupaten Sukabumi pada tahun ini berdasarkan efektivitas PAD tergolong sangat efektif, karena rasio melebihi 100%.
 - d. Pada tahun 2012, rasio efektivitas Kabupaten Sukabumi sebesar 109,41% atau meningkat sebesar 3,15% dari tahun 2011. Kabupaten Sukabumi mampu merealisasikan PAD lebih besar Rp 15.926.106.353 dari target yang ditetapkan, sehingga kinerja keuangan Kabupaten Sukabumi pada tahun 2012 berdasarkan rasio efektivitas tergolong sangat efektif.
 - e. Pada tahun 2013, rasio efektivitas Kabupaten Sukabumi turun sebesar 1,45% dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi sebesar 107,96%. PAD Kabupaten Sukabumi tahun 2013 terealisasi sebesar Rp 273.452.383.010,66, realisasi tersebut meningkat sebesar 47,66% dari realisasi PAD tahun 2012. Sedangkan, target yang ditetapkan berdasarkan adanya tambahan potensi dalam pos pajak, yaitu PBB-P2 yang dipungut oleh Kabupaten Sukabumi meningkat sebesar 49,65% dari tahun 2013 menjadi sebesar Rp 253.302.129.261. Kinerja keuangan Kabupaten Sukabumi pada tahun ini berdasarkan efektivitas PAD tergolong sangat efektif, karena berada pada kisaran lebih dari 100%.

Analisis Efisiensi Kabupaten Sukabumi

Tingkat efisiensi PAD Kabupaten Sukabumi pada tahun anggaran 2009-2013 diuraikan pada pembahasan berikut ini.

- a. Pada tahun 2009, rasio efisiensi PAD Kabupaten Sukabumi sebesar 13,26%. Kinerja keuangan Kabupaten Sukabumi berdasarkan efisiensi PAD pada tahun ini tergolong efisien, karena rasio efisiensi PAD berada dalam kisaran 10%-20%. Efisiensi tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Sukabumi dalam memperoleh PAD telah berhasil menekan biaya yang dikeluarkan. Biaya pemungutan PAD pada tahun 2009 sebesar Rp 10.687.915.423 atau 13,26% dari total PAD yang terealisasi, yaitu sebesar Rp 80.616.078.322,80.
- b. Pada tahun 2010, rasio efisiensi PAD Kabupaten Sukabumi sebesar 4,01% atau turun sebesar 9,25% dari tahun 2009. Sehingga pada tahun ini kinerja keuangan Kabupaten Sukabumi berdasarkan rasio efisiensi PAD tergolong sangat efisien, karena berada dalam kisaran di bawah 10%. Biaya pemungutan PAD pada tahun ini sebesar Rp 3.946.906.878 atau mengalami penurunan sebesar 63,07% dari biaya pemungutan PAD pada tahun 2009. Penurunan tersebut dikarenakan tidak terdapat belanja modal yang dikeluarkan untuk pungutan PAD seperti pada tahun 2009. Biaya pungutan PAD pada tahun ini hanya pada belanja pegawai dan belanja barang dan jasa untuk program peningkatan sumber-sumber penerimaan daerah.
- c. Pada tahun 2011, rasio efisiensi PAD Kabupaten Sukabumi sebesar 3,03% atau menurun sebesar 0,98% dari tahun 2010. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Sukabumi berdasarkan rasio efisiensi PAD tergolong sangat efisien. Kabupaten Sukabumi telah berhasil menekan biaya dalam pencapaian target PAD yang telah ditetapkan. Realisasi PAD Kabupaten Sukabumi pada tahun ini sebesar Rp.151.825.718.336,01.

Sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan PAD sebesar Rp 4.606.137.287. Biaya yang dikeluarkan untuk proses penerapan BPHTB dan persiapan penerapan PBB sebesar 67,84% dari total biaya pemungutan PAD.

- d. Pada tahun 2012, rasio efisiensi PAD Kabupaten Sukabumi sebesar 2,83% atau menurun sebesar 0,20% dari tahun 2011. Berdasarkan besarnya rasio efisiensi PAD tersebut menggambarkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Sukabumi yang sangat efisien dalam pencapaian realisasi PAD tahun 2012. Biaya yang dikeluarkan hanya sebesar Rp 5.247.288.005 dan PAD yang terealisasi sebesar Rp 185.190.545.988.
- e. Pada tahun 2013, kinerja keuangan Kabupaten Sukabumi berdasarkan rasio

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut

- a. Kemandirian keuangan Kabupaten Sukabumi dari tahun 2009 sampai 2013 tergolong sangat rendah dengan menunjukkan pola hubungan instruktif.
- b. Rasio efektivitas PAD Kabupaten Sukabumi rata-rata sebesar 105,67%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Sukabumi berdasarkan rasio efektivitas PAD tergolong sangat efektif.
- c. Kinerja keuangan Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2009-2013 berdasarkan rasio efisiensi PAD tergolong sangat efisien dengan rata-rata setiap tahunnya sebesar 5,02%.

Daftar Pustaka

- Afiffuddin, 2010, **Pengantar Administrasi Pembangunan**, Alfabeta, Bandung
- Akbar, Andari Nurul, 2009, **Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Masa Otonomi Daerah 2003-2007**, Skripsi Sarjana, Universitas Djuanda, Bogor
- Ardhini dan Sri Handayani, 2010, **Pengaruh Rasio Keuangan Daerah terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik dalam Perspektif Teori**

efisiensi PAD tergolong sangat efisien. Rasio efisiensi pada tahun ini sebesar 1,98% atau mengalami penurunan sebesar 0,85% dari tahun 2012 yang berarti bahwa Kabupaten Sukabumi berhasil melampaui target PAD yang telah ditetapkan dengan menekan biaya pemungutan PAD yang dikeluarkan hanya sebesar Rp 5.420.225.765 atau 1,98% dari total realisasi PAD tahun 2013. Peningkatan tingkat efisiensi PAD tersebut dikarenakan ada tahun ini Kabupaten Sukabumi telah melakukan pengalihan PBB-P2 yang pemungutan dan pengelolaannya dilakukan oleh daerah, sehingga realisasi PAD Kab. Sukabumi meningkat menjadi sebesar Rp273.452.383.010,66 atau meningkat sebesar 47,66% dari tahun sebelumnya.

Keagenan, Universitas Diponegoro, Semarang

- Arinta, Kustadi, 1993, **Pengantar Akuntansi Pemerintahan**, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Aryadi, Rudi, 2011, **Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan**, ILMIAH, Volume III No.2, halaman 1-13
- Badan Pusat Statistik, **Kabupaten Sukabumi dalam Angka**, Berbagai edisi, Sukabumi, Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukabumi
- Bastian, Indra dan Gatot Soepriyanto, 2002, **Sistem Akuntansi Sektor Publik: Konsep untuk Pemerintahan Daerah**, Edisi ketiga, Salemba Empat, Jakarta
- Bastian, Indra, 2010, **Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar**, Erlangga, Jakarta
- Berliana, Sandra, 2013, **Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Kota Bogor melalui Pendekatan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Kemandirian**, Skripsi Sarjana, Universitas Djuanda, Bogor
- Bisma, I Dewa Gde dan Hery Susanto, 2010, **Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007**, GaneÇ Swara Edisi

- Khusus, Vol. 4, No.3, Desember, halaman 75
- Dwirandra, A.A.N.B., 2007, **Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2002-2006**, Universitas Udayana, Bali
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2013, **Deskripsi dan Analisis APDB 2013**, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Jakarta Pusat
- Halim, Abdul, 2002, **Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah**, Salemba Empat, Jakarta
- _____, 2008, **Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah**, Book review, Salemba Empat, Jakarta
- Mahmudi, 2010, **Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**, Edisi kedua, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Mardismo, 2010, **Akuntansi Sektor Publik**, Andi, Yogyakarta
- Nordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi Putra, dan Maulidah Rahmawati, 2008, **Akuntansi Pemerintahan**, Salemba Empat, Jakarta
- Norum, Nova Gatindra, 2007, **Analisis Penilaian Kinerja dengan Pendekatan Rasio Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Pemerintah Kabupaten Tuban**, Skripsi Sarjana, Universitas Negeri Malang, Malang
- Nurhayati, Tuti, 2013 **Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Masa Otonomi (Studi Kasus Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2009-2011)**, Skripsi Sarjana, Universitas Hasanudin
- Peraturan Bupati, No.43 Tahun 2010, **Penjabaran Pertanggungjaaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009**, Kabupaten Sukabumi
- Peraturan Daerah, No 21 Tahun 2013, **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014**, Kabupaten Sukabumi
- Peraturan Daerah, No 16 Tahun 2010, **Pajak Air Tanah**, Kabupaten Sukabumi
- Peraturan Daerah, No 8 Tahun 2011, **Pajak Sarang Burung Walet**, Kabupaten Sukabumi
- Peraturan Daerah, No 15 Tahun 2010, **Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan**, Kabupaten Sukabumi
- Peraturan Daerah, No 6 Tahun 2011, **Pajak Penerangan Jalan**, Kabupaten Sukabumi
- Peraturan Daerah, No 23 Tahun 2012, **Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan**, Kabupaten Sukabumi
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, **Standar Akuntansi Pemerintah**, Pemerintah Republik Indonesia
- _____, No. 58 Tahun 2005, **Pengelolaan Keuangan Daerah**, Pemerintah Republik Indonesia.
- _____, No. 24 Tahun 2005, **Standar Akuntansi Pemerintah**, Pemerintah Republik Indonesia.
- _____, No.105 Tahun 2000, **Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah**, Pemerintah Republik Indonesia.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan
- Ramadhani, M. Ilham, 2009, **Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dan Kapasitas Pinjaman Daerah Sebelum Otonomi Daerah dan Pada Masa Otonomi Daerah di Kota Depok Tahun Anggaran 1997/1998-2008**, Skripsi Sarjana, Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Soemarso, 2009, **Akuntansi Suatu Pengantar**, Edisi Empat, Salemba Empat, Jakarta
- Sularso, Havid dan Yanuar E. Restianto, 2011, **Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah**, Media Riset Akuntansi, Vol. 1 No. 2, Agustus, halaman 109-124
- Umar, Husein, 1997, **Riset Akuntansi**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32, 2004, Tentang Pemerintahan Daerah
- _____, Nomor 33, 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Wijaya, H.A.W., 2011, **Otonomi Daerah dan Daerah Otonom**, Rajawali Press, Jakarta

www.djpk.depkeu.go.id(diakses tanggal 20
Maret 2015)

www.eprints.walisongo.ac.id (diakses tanggal
3 Maret 2015)

www.jabarprov.go.id/index.php/pages/id/104
2 (diakses tanggal 27 April 2015)

www.miung.com (diakses tanggal 2 Maret
2015)

